

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Amanat dari Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara jelas menjabarkan bahwa pendidikan yang harus dilaksanakan adalah pendidikan yang mampu menciptakan kondisi agar setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri peserta didik, tidak hanya mengembangkan sisi intelektual atau kecerdasannya tetapi juga aspek nilai yang bersumber dari nilai-nilai moral dan agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai budaya. Sehingga peserta didik tumbuh menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang handal serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu pendidikan yang dilaksanakan baik oleh lembaga pengelola pendidikan dan institusi pendidikan harus mengarahkan pendidikan sesuai dengan amanat dari undang-undang, yaitu pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan budi pekerti atau dalam istilah modern sekarang disebut karakter.

Pentingnya pengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pendidikan diamanatkan pula oleh lembaga pendidikan dunia UNESCO melalui empat pilar pendidikan yaitu, *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together* (<http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/about-us/strategy/the-four-pillars-of-learning/>). Dapat dikatakan pendidikan berdasarkan empat pilar pendidikan UNESCO ini, adalah pendidikan yang secara seimbang dapat mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan agar peserta didik mempunyai kemampuan keahlian yang menjadi

bekal dimasa depannya dan memiliki kemampuan agar peserta didik mampu menjadi bagian dari masyarakat baik tingkat kawasan maupun masyarakat dunia. Pada pilar *learning to be* dan *learning to live together* ditekankan pendidikan mengenai nilai-nilai menjadi penekanan yaitu untuk menumbuhkan kemampuan analisis sosial sebagai dasar pengembangan potensi psikososial dari peserta didik. Potensi psikososial tersebut kemudian menjadi dasar peserta didik agar dapat memahami nilai-nilai universal yang dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap berbagai bangsa dan negara sehingga dapat hidup bersama sebagai masyarakat dunia.

Beberapa ahli pendidikan juga mengemukakan tentang pentingnya pendidikan karakter seperti Theodore Roosevelt yang mengemukakan pentingnya pendidikan karakter dalam pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat (dalam Lickona, 2013:03), 'Mendidik seseorang hanya untuk berfikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan bermasyarakat'. dan William Kilpatrick menyatakan kedudukan pendidikan moral sebagai inti dari pendidikan di sekolah (dalam Lickona, 2013: 03), 'Hal mendasar yang dihadapi sekolah adalah tentang pendidikan moral. Masalah-masalah lain yang kemudian muncul sebenarnya berdasar pada pendidikan moral yang disampaikan. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan pun bergantung pada hasil dari pendidikan karakter'.

Perlunya pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah juga disampaikan Lickona (dalam Samani dan Hariyanto, 2014: 13), pendidikan karakter diperlukan karena beberapa hal, yaitu :

1. Merupakan kebutuhan yang jelas dan mendesak.
2. Sejak dulu sampai sekarang penyebaran nilai-nilai menjadi tugas peradaban.
3. Peranan sekolah sebagai pendidik moral menjadi lebih vital karena jutaan anak-anak hanya mendapat tuntutan moral sekedarnya dari para orang tua nya, sementara pusat-pusat pengaruh bimbingan moral seperti gereja atau kuil juga absen dalam kehidupan mereka.
4. Bahkan dalam masyarakat yang penuh dengan konflik, selalu ada pemahaman etika secara umum.
5. Demokrasi secara khusus memerlukan pendidikan moral.

6. Tidak ada suatu pendidikan yang bebas nilai.
7. Pertanyaan-pertanyaan tentang moral adalah suatu pertanyaan besar yang dihadapi oleh setiap orang dan juga umat manusia.
8. Telah hadir dukungan yang semakin besar dan berbasis luas terhadap pelaksanaan pendidikan moral di sekolah-sekolah.

Pandangan pentingnya integrasi pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan seperti yang telah dikemukakan bukannya tidak beralasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi turut mendorong timbulnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moralitas. Permasalahan-permasalahan etika dan moral seperti penggunaan kata-kata kasar baik panggilan nama ataupun bahasa makian, kejujuran dalam berbagai aktivitas kehidupan, toleransi antar ras antar agama, seks bebas, perdagangan manusia, prostitusi, pornografi, penggunaan media elektronik secara tidak bertanggung jawab, penindasan dan kekerasan, penggunaan obat-obatan terlarang, korupsi, pencurian dan perampokan dan masih banyak lagi mendorong agar dilaksanakannya pendidikan karakter dalam pendidikan.

Untuk usia muda yang masih dalam masa pendidikan, Lickona (2013 : 20) mengolongkan permasalahan-permasalahan etika dan moral tersebut menjadi beberapa bentuk jenis penyimpangan, yaitu ; kekerasan dan tindakan anarki, pencurian, tindakan curang, pengabaian terhadap aturan yang berlaku, tawuran antarsiswa, ketidaktoleranan, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya, dan sikap perusakan diri.

Dari berbagai sumber media elektronik dan cetak di Indonesia khususnya di daerah perkotaan dan daerah urban bentuk-bentuk permasalahan etika dan moral pada anak-anak dan remaja ini disebabkan terutama karena, (1) makin lemahnya hubungan antara anak dan orang tua yang disebabkan oleh adanya arus globalisasi dalam bidang telekomunikasi dan komunikasi serta adanya pergeseran perilaku sosial ekonomi dari masyarakat agrikultur ke masyarakat industri. Lemahnya hubungan antara orang tua dan anak ini salah satunya menyebabkan pergeseran peristiwa sosial dari *parent's centered* menjadi *community's centered* , (2) makin melemahnya peran dari pemuka agama, lembaga agama seperti suarua dan pesantren, ikatan pemuda keagamaan, dan pemuka adat, sebagai pedoman dan

panutan dalam penumbuhan nilai-nilai etika dan moral pada anak-anak dan remaja (3) pemahaman kebebasan tanpa didasari penghayatan nilai-nilai Pancasila, dan (4) maraknya penayangan acara di media khususnya di media TV yang tidak memberikan nilai-nilai etika dan moral bahkan cenderung sebaliknya.

Sebagai tanggapan dari urgensi pendidikan karakter tersebut Pemerintah Indonesia sejak 2010 melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menggulirkan kebijakan pendidikan karakter untuk dilaksanakan di setiap institusi pendidikan. Dalam Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional pendidikan karakter dikembangkan melalui gerakan nasional pendidikan karakter yang diprogramkan secara sistemik dan terintegrasi. Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh (dalam Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional) menegaskan tentang pentingnya pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, bahwa “tidak ada yang menolak tentang pentingnya karakter, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menyusun dan menyistemasi, sehingga anak-anak dapat lebih berkarakter dan lebih berbudaya”. Disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pusurbuk Kemdiknas 2011 bahwa upaya pendidikan karakter yang dibangun bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya, yaitu pendidikan karakter yang melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Selanjutnya dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Kemdiknas 2010 disebutkan bahwa pendidikan karakter disusun dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga kebijakan pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan nasional (RPJP 2005 -2025). Dalam Pencapaian RPJP dilakukan melalui pentahapan, yakni Tahap I: 2010—2014; Tahap II: 2014—2020; Tahap III: 2020—2025. Program Utama pengembangan pendidikan karakter dalam RAN Kemdiknas adalah

Pengembangan Pendidikan Karakter yang terjabar dalam enam Program Utama, yaitu (1) Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Pendidikan Karakter, (2) Pengembangan Sinergi dan Konsep Pendidikan karakter, (3) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya, (4) Penelitian Pendidikan Karakter, (5) Perintisan Model Pendidikan Karakter, (6) Implementasi dan Diseminasi Model Pendidikan Karakter.

Garis besar pengembangan pendidikan karakter di Indonesia dapat dilihat dalam Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Dalam Desain Induk Pendidikan Karakter (2010 : 24-26) disebutkan bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan pendidikan karakter dirancang dengan strategi berdasarkan latar atau cakupannya yaitu pada konteks makro dan dan pada konteks mikro. konteks makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Pada tahap ini pengembangan karakter dibagi ke dalam tiga tahap, yakni *perencanaan*, *pelaksanaan*, dan *evaluasi hasil*.. Dari tahap perencanaan dikembangkan perangkat pendidikan karakter, pada tahap pelaksanaan dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan formal dan nonformal, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan yakni *intervensi* dan *habitiasi*. Pada tahap evaluasi hasil dirancang dilakukan asesmen program untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik, sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat, dan pikiran yang argumentatif. Pada konteks mikro ini, pendidikan karakter berpusat pada satuan pendidikan formal dan nonformal secara holistic (menyeluruh). pengembangan karakter dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas (terintegrasi dalam semua materi pembelajaran), kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan pendidikan formal dan nonformal (dilakukan melalui : 1. penugasan, 2. pembiasaan, 3. pelatihan, 4. pengajaran, 5. pengarahan, serta 6. keteladanan.),

kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler (dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter), serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat (proses penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku berkarakter mulia).

Dalam pendidikan karakter yang dikembangkan tersebut, dikembangkan 18 nilai inti atau sikap karakter yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab, yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai lima sila pada Pancasila dan tujuan pendidikan nasional (Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah Balitbang Puskur Kemdiknas, 2010 : 9-10). Kedelapan belas nilai karakter ini adalah nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam pendidikan karakter di sekolah. Namun, sekolah atau satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan.

Pelaksanaan pendidikan karakter yang dikembangkan seperti yang tergambar pada Desain Induk Pendidikan Karakter Kemdiknas tersebut, diimplementasikan melalui tiga strategi, antara lain ; (1) Strategi di Tingkat Kementerian Pendidikan Nasional, (2) Strategi di Tingkat Daerah, dan (3) Strategi di Tingkat Satuan Pendidikan. Strategi di Tingkat Kementerian Pendidikan Nasional memiliki tugas dan wewenang dalam : (1) pengembangan regulasi, (2) pengembangan kapasitas, (3) sosialisasi, (4) implementasi dan kerjasama, serta (5) monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut dilaksanakan dengan prinsip komprehensif dan berfokus pada tugas, pokok, fungsi, dan sasaran masing-masing Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional diselenggarakan secara terpadu yang didukung secara sinergis oleh Dinas

Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Daerah. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Tingkat Daerah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu ; (1) Penyusunan perangkat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (2) Penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan, (3) Pemberian dukungan kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan, (4) Pemberian Dukungan Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan, dan (5) Sosialisasi ke masyarakat, Komite Pendidikan, dan para pejabat pemerintah di lingkungan dan di luar diknas. Pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat mikro yang dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikan dan diimplementasikan melalui langkah-langkah ; (1) Sosialisasi, (2) Pengembangan kegiatan sekolah, (3) Kegiatan pembelajaran dan (4) Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar (Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Balitbang Puskurbuk Kemdiknas, 2011 : 11-16).

Kemudian, implementasi pada tingkatan mikro yang dilaksanakan oleh satuan atau institusi pendidikan diwujudkan melalui pembelajaran aktif dengan penilaian berbasis kelas disertai dengan program remidiasi dan pengayaan. menggunakan pendekatan belajar aktif (seperti pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja). Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu ; Kegiatan rutin, Kegiatan spontan, Keteladanan, Pengkondisian, Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler dan Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat (Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

Tetapi setelah beberapa tahun di implementasikan gerakan pendidikan karakter yang diprogramkan oleh pemerintah ini, terlihat masih belum menghasilkan perubahan yang signifikan pada kualitas peserta didik khususnya peserta didik pada pendidikan tingkat dasar yang berada dalam masa pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Tujuan tahap pertama pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan dalam periode 2010-2014 yang memiliki tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran sikap dan keyakinan pentingnya penghayatan nilai-

nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara melalui proses pembelajaran dan pengembangan budaya sekolah sehingga peserta didik khususnya, menyadari dan meyakini kembali Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa. Sayangnya pencapaian tujuan tahap yang telah terlewati ini bisa jadi bertolak belakang dengan capaian pendidikan karakter di lapangan. Masih banyak terdapat perilaku-prilaku karakter dari peserta didik yang bersifat kurang positif dilakukan oleh peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal.

Perilaku-prilaku kurang positif dari peserta didik yang masih ditunjukkan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas diantaranya, (1) Bolos belajar, meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin ketika jam belajar masih berlangsung. Mampir di kantin atau keluyuran di pasar serta tempat keramaian lainnya. (2) Siswa sering minta permissi meninggalkan kelas. Baik yang belajar dengan guru tertentu namun juga untuk semua guru yang mengajar di kelas. Ada yang benar-benar meninggalkan kelas karena keperluan penting. (3) Sering datang terlambat, dengan berbagai alasan baik dengan alasan yang benar atau tidak jujur. (4) Suka mengganggu teman ketika sedang belajar. Mengganggu teman di samping tempat duduk termasuk perilaku menyimpang yang dilakukan siswa. Ini sekaligus akan mengganggu proses belajar keseluruhan. Cara mereka mengganggu pun bermacam-macam. Ada yang mencolek teman yang lagi asyik belajar, mengajak teman di samping mengobrol, sampai membuat lelucon yang sesungguhnya tidak lucu. (5) Malas mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah (PR) yang diberikan guru memiliki tujuan tertentu. Secara garis besar bertujuan agar siswa melakukan kegiatan belajar di luar jam sekolah. Namun siswa ada yang malas atau tidak sempat mengerjakannya di rumah. Selain tidak dikerjakan di rumah biasanya siswa juga mengerjakan PR tersebut di kelas ketika sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan melihat pekerjaan siswa lain yang telah mengerjakan (<http://www.matrapendidikan.com /2015/03/perilaku-menyimpang-dalambelajar.html>).

Pelaksanaan kegiatan Ujian nasional (UN) yang telah diselenggarakan dari tahun 2006 pun memiliki dampak kontradiktif terhadap pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah. Upaya mendidik siswa di sekolah selama priode masa



pendidikan baik ditingkat sekolah dasar (SD/MI), tingkat menengah pertama (SMP/MTs) maupun di tingkat sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK/MAK) di akhiri dengan contoh sikap-sikap yang bertolak belakang dengan nilai-nilai karakter yang dibangun. Kecurangan dan ketidakjujuran tidak hanya terjadi melalui keinginan siswa tetapi juga telah melibatkan guru, dan pihak sekolah serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan menjaga nama baik dan prestisi. Meskipun telah dilakukan berbagai inovasi untuk meminimalisir tingkat ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN, namun dorongan untuk menjaga nama baik dan prestisi mendorong berbagai pihak untuk tetap melakukan tindakan ketidakjujuran dan kecurangan dalam kegiatan UN. Upaya-upaya seperti pengawasan silang antar sekolah, pengawasan oleh pihak independen, pemutakhiran paket soal ujian dengan barkode, proposrsi penentuan kelulusan dan lain-lain tidak menghentikan kecurangan dan ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN.

Tentu saja fenomena dalam UN ini secara langsung dan tidak langsung mengajarkan kecurangan dan ketidakjujuran terhadap siswa dan menghancurkan upaya mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang baik. Lebih jauh lagi, di beberapa daerah siswa yang telah selesai mengikuti UN melakukan selebrasi yang kurang positif seperti corat-coret seragam sekolah, konvoi kendaraan yang pada akhirnya menimbulkan kenekalan remaja, mengganggu lalu-lintas, meresahkan masyarakat, ada juga selebrasi dengan menginap di hotel dengan pacar bahkan di Jakarta beberapa sekolah SMA merencanakan kegiatan pesta bikini 'Splash After Class' yang akan dilakukan pada hari Sabtu 25 April 2015 di The Media Hotel and Towers di Pool Area Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 3. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah penurunan kesadaran dan nilai-nilai prilaku dari siswa itu sendiri ([http://metro.sindonews.com /read /992988/170/gabungan-sekolah-di-jakarta-akan-gelar-pesta-bikini-1429767747](http://metro.sindonews.com/read/992988/170/gabungan-sekolah-di-jakarta-akan-gelar-pesta-bikini-1429767747)).

Kenakalan-kenakalan dan penyimpangan prilaku lainnya dari pelajar bisa dikatakan masih berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Seperti sex bebas yang masih marak terjadi dikalangan pelajar. Saat ini peristiwa sex bebas ini tidak hanya dilakukan dikalangan siswa sekolah menengah atas saja, pada kalangan siswa di tingkatan bawahnya pun tidak sedikit yang mencoba melakukan sex

bebas ini. Tentu saja perilaku sex bebas di kalangan pelajar menjadi hal yang tidak sepatutnya dilakukan selain bertentangan dengan nilai-nilai norma susila dan agama juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seksual yang berbahaya.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2014 jumlah seks bebas di kalangan remaja usia 10-14 tahun mencapai 5,38 persen, sedangkan pada usia 14-19 seks bebas mencapai 51,8 persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan BKKBN Juga, tak kurang dari 1 juta remaja melakukan aborsi di setiap tahunnya. Selanjutnya penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2015 Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang jumlah ini di perkirakan akan terus bertambah. Narkoba pun sudah semakin mengkhawatirkan karena BNN sudah mensurvei di tahun 2014 Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun. Perkelahian antar pelajar atau tawuran adalah bentuk kenakalan remaja yang akhir-akhir ini kerap dilakukan oleh siswa sekolah. Penyebabnya dari tawuran ini beragam dari saling ledek, permusuhan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi antar sekolah, ego tempat dimana sekolah, komunitas geng motor siswa sekolah dan lain lain. Pada periode Januari - Oktober 2013, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat 229 kasus tawuran pelajar tingkat SMP dan SMA yang mengakibatkan 19 siswa meninggal dunia. Jumlah ini meningkat sekitar 44 persen dibanding tahun lalu yang hanya 128 kasus. Perilaku negatif siswa lainnya yaitu yang lainnya yaitu banyak sebagian remaja yang meminum minuman keras dari coba-coba atau pembuktian jati diri dalam komunitas atau karena memiliki tekanan hidup di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. ([http://rizalfajar15.blogspot.co.id/2015\\_03\\_01\\_archive.html](http://rizalfajar15.blogspot.co.id/2015_03_01_archive.html)).

Dari uraian diatas tergambar bahwa kesadaran nilai-nilai karakter bangsa pada peserta didik atau siswa yang dicoba ditumbuhkan melalui gerakan pendidikan karakter bisa dikatakan masih lemah. Tujuan gerakan pendidikan karakter pada periode pertama dengan tujuan menumbuhkan kesadaran nilai-nilai karakter pada peserta didik dan pelaku pendidikan masih belum optimal. Meskipun disadari bahwa permasalahan-permasalahan yang mendorong peserta didik untuk melakukan berbagai perilaku-prilaku yang bertentangan dengan nilai-

nilai karakter dapat datang dari berbagai hal, namun patut dipertanyakan juga bagaimana peran dan efektifitas dari pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah terhadap nilai-nilai karakter pada peserta didik. Penulis memandang bahwa fenomena penurunan kualitas karakter peserta didik di sekolah yang terjadi di semua tingkatan merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Penulis memandang bahwa dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada pendidikan formal penting dilaksanakan disetiap jenjang pendidikan formal, namun pendidikan formal di tingkat sekolah dasar memiliki tingkat urgensi yang lebih dari jenjang pendidikan yang lainnya karena pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat ini mendasari jenjang-jenjang setelahnya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan latar belakang yang telah disampaikan, tentang, **“Implementasi Pendidikan Karakter pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Studi Kasus SDN Babakansari)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini tentang ‘Bagaimana efektifitas pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi “Implementasi Pendidikan Karakter pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar’(Studi Kasus SDN Babakansari). Atau dapat dirumuskan kedalam poin-poin rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perencanaan dan pengembangan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar?;
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter di sekolah dasar?;
3. Bagaimana pihak sekolah mengevaluasi ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah dasar?;
4. Bagaimanakah masing-masing peran dari pimpinan sekolah, guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar?;
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan pendidikan karakter?;

6. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah dalam menangani peserta didik yang mengalami permasalahan dengan nilai-nilai karakter?.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam fokus penelitian ini penulis menetapkan beberapa fokus penelitian untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, secara umum difokuskan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di tingkat sekolah dasar (studi kasus SDN Babakansari). Adapun poin-poin fokus penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar;
2. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar;
3. Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah;
4. Peran dari pimpinan sekolah, guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar;
5. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar;
6. Upaya-upaya dari pihak sekolah dalam menangani peserta didik yang mengalami permasalahan dengan nilai-nilai karakter.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan penelitian yang dicari untuk menjawab rumusan masalah di atas secara deskriptif. Tujuan-tujuan penelitian itu antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter direncanakan dan dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
3. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter dievaluasi pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
4. Untuk mengetahui masing-masing peran dari pimpinan sekolah, guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar;

5. Untuk mengetahui berbagai kendala pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar;
6. Untuk mengetahui bentuk penanganan peserta didik yang mengalami permasalahan dengan nilai-nilai karakter di sekolah dasar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan masukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti sekolah, UPTD, dinas pendidikan kota/kabupaten, dan pemerintah, tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar. Sehingga nantinya bisa menjadi bahan kajian untuk mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan karakter menjadi lebih baik untuk tingkat sekolah dasar.